Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 2, No. 1, February 2026
Page: 49-58

Evaluasi Kinerja Pengelolaan SIPD, SPJ, dan Penginputan Gaji pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire: Studi Kasus Keterbatasan SDM

Maria Burumi[1*], Kristian H.P. Lambe[2], Johannes Baptista Halik[3]
[1]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: miaburumi722@gmail.com[1]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan penginputan gaji pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire dalam konteks keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pimpinan dan staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji belum berjalan optimal. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, ketimpangan beban kerja, serta minimnya pelatihan teknis menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pelaporan, potensi kesalahan administrasi, dan menurunnya kualitas pelayanan internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penataan tugas yang proporsional, serta peningkatan dukungan manajerial guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: kinerja, SIPD, SPJ, penginputan gaji, sumber daya manusia.

Abstract

This study aims to evaluate the performance of the Regional Government Information System (SIPD) management, Accountability Report (SPJ) preparation, and salary data input at the Social Service Office of Nabire Regency in the context of limited human resources. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving managerial and technical staff responsible for financial administration. The findings indicate that the management of SIPD, SPJ, and payroll data has not been optimally implemented. Limitations in the number and technical competence of personnel, unequal workload distribution, and insufficient training constitute the main constraints affecting performance. These conditions have resulted in reporting delays, potential administrative errors, and decreased quality of internal services. This study recommends strengthening human resource capacity through continuous technical training, proportional task allocation, and enhanced managerial support to improve the effectiveness, transparency, and accountability of financial administration management. The results are expected to contribute to policy formulation and institutional improvement in public sector financial governance, particularly in regions with limited resources.

Keywords: *performance, SIPD, SPJ, salary input, human resources.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Implementasi SIPD diharapkan mampu mendukung terwujudnya good governance melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Selain SIPD, pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan sistem penginputan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi komponen penting dalam administrasi keuangan daerah. SPJ berfungsi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sedangkan sistem penggajian menjamin pemenuhan hak keuangan pegawai secara tepat waktu dan akurat (Rizka, 2025). Integrasi ketiga sistem tersebut menjadi prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang profesional dan terpercaya.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Kompetensi teknis, pengalaman kerja, serta intensitas pelatihan menjadi faktor penentu efektivitas penggunaan sistem digital pemerintahan (Septiani & Isnawaty, 2024; Febriana, 2025). Tanpa dukungan SDM yang memadai, sistem informasi berpotensi menjadi beban administratif yang justru menghambat kinerja organisasi.

Di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, tantangan implementasi sistem digital menjadi semakin kompleks. Kabupaten Nabire sebagai salah satu wilayah di Papua memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas SDM pemerintahan. Kondisi ini berdampak langsung pada pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nabire, khususnya dalam pengoperasian SIPD, penyusunan SPJ, dan penginputan gaji pegawai.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sistem tersebut. Beban kerja yang tinggi, ketergantungan pada individu tertentu, serta minimnya pelatihan teknis menyebabkan proses administrasi berjalan kurang optimal. Fenomena ini sejalan dengan temuan Aditiya dan Kusuma (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM merupakan faktor dominan penghambat efektivitas SIPD di tingkat pemerintahan lokal.

Fenomena Pengelolaan SIPD, SPJ, dan Penginputan Gaji

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada Dinas Sosial Kabupaten Nabire, ditemukan beberapa fenomena utama sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Fenomena Pengelolaan Administrasi Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Nabire

No	Fenomena	Dampak terhadap Kinerja
1	Ketergantungan pada pegawai tertentu	Terhambatnya pekerjaan saat pegawai tidak hadir
2	Kompetensi SDM tidak merata	Kesalahan input dan revisi SPJ
3	Beban kerja berlebih	Keterlambatan pelaporan
4	Minim pelatihan teknis	Rendahnya pemahaman sistem
5	Monitoring internal terbatas	Masalah berulang tanpa perbaikan

Sumber: Hasil observasi awal (2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan administrasi keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan manajerial. Ketidakseimbangan antara kompleksitas sistem dan kapasitas SDM menyebabkan munculnya berbagai hambatan operasional yang berpotensi menurunkan kualitas tata kelola keuangan.

Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Kajian empiris mengenai implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan daerah umumnya berfokus pada aspek efektivitas sistem dan kepatuhan regulasi (Kholifah, 2023; Septiani & Isnawaty, 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah dengan infrastruktur relatif memadai. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara SIPD, SPJ, dan

sistem penggajian dalam konteks keterbatasan SDM masih terbatas.

Selain itu, studi terdahulu cenderung memisahkan analisis antara sistem perencanaan, pelaporan, dan penggajian. Padahal, ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Minimnya penelitian terpadu dalam konteks daerah terpencil menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola keuangan Dinas Sosial Kabupaten Nabire melalui peningkatan efektivitas pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan berpotensi menimbulkan keterlambatan pencairan dana, penurunan kualitas pelayanan sosial, serta meningkatnya risiko kesalahan administrasi dan temuan audit. Mengingat peran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat, optimalisasi sistem keuangan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi kinerja berbasis kondisi riil SDM sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, aplikatif, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji di Dinas Sosial Kabupaten Nabire?
2. Bagaimana dampak keterbatasan sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan sistem tersebut?
3. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji?
4. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan?
5. Strategi apa yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sistem keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Nabire?

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Tata Kelola Keuangan Publik

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pembangunan serta keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). SIPD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

Dalam perspektif *digital government*, penggunaan sistem informasi terpadu mampu meningkatkan efisiensi proses birokrasi, kualitas data, serta akuntabilitas publik (Mergel et al., 2019). Selain itu, transformasi digital dalam sektor publik menuntut adanya integrasi antara sistem teknologi dan kapasitas organisasi agar menghasilkan kinerja yang optimal (Dunleavy et al., 2021).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa implementasi SIPD berkontribusi positif terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Septiani dan Isnawaty (2024) menemukan bahwa SIPD mempercepat proses pelaporan keuangan, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Febriana (2025), yang menyatakan bahwa efektivitas SIPD sangat bergantung pada kompetensi operator dan dukungan manajemen.

Dengan demikian, SIPD tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknologi, tetapi juga sebagai sistem manajerial yang keberhasilannya ditentukan oleh interaksi antara teknologi, manusia, dan kebijakan.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai Instrumen Akuntabilitas Publik

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen administratif yang memuat laporan penggunaan anggaran beserta bukti pendukung transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan pemerintah (Rizka, 2025). SPJ menjadi instrumen utama dalam proses audit, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kerangka *public financial management*, SPJ berfungsi untuk menjamin transparansi dan mencegah penyimpangan anggaran (Diamond, 2020). Ketepatan dan kelengkapan SPJ mencerminkan kualitas sistem pengendalian internal suatu instansi.

Penelitian Kholifah (2023) menunjukkan bahwa kesalahan dalam penyusunan SPJ sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis dan lemahnya koordinasi antarunit kerja. Sementara itu, Rizka (2025) menegaskan bahwa kualitas SPJ sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan efektivitas supervisi internal.

Dengan demikian, SPJ tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai indikator profesionalisme pengelolaan keuangan publik.

Sistem Penginputan Gaji ASN dalam Administrasi Keuangan Daerah

Penginputan gaji ASN merupakan proses administratif yang bertujuan memastikan pembayaran hak pegawai secara tepat waktu, akurat, dan sesuai regulasi (Kementerian PANRB, 2019). Proses ini melibatkan integrasi data kepegawaian, keuangan, dan absensi dalam sistem digital pemerintahan.

Menurut Kim dan Perry (2020), sistem penggajian yang efektif berkontribusi terhadap kepuasan kerja dan stabilitas organisasi sektor publik. Ketepatan pembayaran gaji juga berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan produktivitas pegawai (Vandenabeele et al., 2018).

Di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan sistem penggajian sering menghadapi tantangan teknis dan administratif, terutama di wilayah dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur (Aditiya & Kusuma, 2024). Kesalahan input data dan keterlambatan administrasi berpotensi menurunkan kepercayaan pegawai terhadap sistem organisasi.

Oleh karena itu, sistem penggajian perlu didukung oleh SDM yang kompeten serta mekanisme validasi yang kuat.

Kinerja Organisasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Kinerja organisasi publik merujuk pada tingkat pencapaian tujuan melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien (Richard et al., 2009). Dalam konteks pemerintahan, kinerja tidak hanya diukur dari aspek output, tetapi juga kualitas proses dan dampak kebijakan.

Model *performance management* menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi (Van Dooren et al., 2019). Sementara itu, pendekatan *Balanced Scorecard* tetap relevan dalam mengukur kinerja organisasi publik secara multidimensional (Niven, 2021).

Penelitian Dunlop et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi dan kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja administrasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia.

Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan

Sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan. Teori *human capital* menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas organisasi (Becker, 1964).

Dalam konteks modern, teori *resource-based view* menegaskan bahwa SDM yang kompeten merupakan keunggulan kompetitif organisasi (Barney, 2018). Studi Mergel et al. (2019) menekankan bahwa transformasi digital sektor publik hanya akan berhasil apabila didukung oleh kapasitas SDM yang adaptif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi teknis, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem digital (Agolla et al., 2021; Septiani & Isnawaty, 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa teknologi tanpa dukungan SDM yang memadai tidak akan menghasilkan kinerja optimal.

Definisi Operasional Konsep Penelitian

Untuk memperjelas fokus penelitian, berikut definisi operasional konsep utama:

Tabel 2. Definisi Operasional dan Konsep Kunci

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kinerja Pengelolaan SIPD	Tingkat efektivitas penggunaan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Ketepatan waktu, akurasi data, integrasi sistem
Kualitas SPJ	Tingkat kelengkapan dan ketepatan dokumen pertanggungjawaban	Kelengkapan dokumen, frekuensi revisi,

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
		kepatuhan regulasi
Penginputan Gaji	Proses pengelolaan data penggajian ASN secara digital	Ketepatan pembayaran, validitas data, konsistensi laporan
Keterbatasan SDM	Kondisi kekurangan jumlah dan kompetensi pegawai	Jumlah pegawai, tingkat pelatihan, pengalaman kerja
Kinerja Administrasi	Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan internal	Kecepatan layanan, minim kesalahan, kepatuhan prosedur

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Kholifah	2023	SIPKD dan SPJ	Kendala utama pada kompetensi SDM
Septiani & Isnawaty	2024	Efektivitas SIPD	Efektif, tetapi kurang pelatihan
Aditiya & Kusuma	2024	SIPD tingkat kecamatan	SDM dan fasilitas terbatas
Rizka	2025	Sistem akuntansi kas	Perlu penguatan pengawasan
Febriana	2025	SIPD dan akuntabilitas	Bergantung pada SDM

Sumber: Dirangkum dari penelitian terdahulu (2025)

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas SDM.

Berdasarkan telaah literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang belum terjawab secara optimal, yaitu:

1. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada SIPD, tanpa mengintegrasikan analisis dengan SPJ dan sistem penggajian.
2. Penelitian terpadu yang mengkaji ketiga sistem dalam satu instansi masih sangat terbatas.
3. Konteks daerah terpencil dengan keterbatasan SDM dan infrastruktur belum banyak mendapat perhatian.
4. Studi sebelumnya lebih menekankan aspek teknis sistem, sementara dimensi manajerial dan beban kerja internal kurang dieksplorasi.
5. Minimnya penelitian kualitatif mendalam yang menggali pengalaman praktis pengelola sistem.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dengan mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara SIPD, SPJ, dan penginputan gaji dalam konteks keterbatasan SDM di daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan tata kelola keuangan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan penginputan gaji di Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif fenomena sosial, organisasi, dan administratif dalam konteks nyata (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan untuk menggali secara intensif praktik pengelolaan administrasi keuangan pada satu instansi tertentu sebagai unit analisis utama (Yin, 2018).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Nabire yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan SIPD, penyusunan SPJ, dan administrasi penggajian. Mengingat karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi dibandingkan generalisasi statistik, penelitian ini tidak menggunakan sampel dalam pengertian kuantitatif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Informan utama terdiri atas kepala dinas, pejabat pengelola keuangan, operator SIPD, bendahara, serta staf administrasi yang terlibat langsung dalam proses pelaporan

dan penggajian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai lokasi yang merepresentasikan konteks daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian serta ketersediaan akses data dan informan. Pengumpulan data dilakukan selama periode September hingga Desember 2025, yang mencakup tahap observasi awal, wawancara mendalam, dokumentasi, serta proses verifikasi data. Rentang waktu tersebut dipandang cukup untuk menangkap dinamika pengelolaan administrasi keuangan dalam satu siklus pelaporan anggaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi informan (Kallio et al., 2016). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan SIPD, penyusunan SPJ, dan penginputan gaji dalam aktivitas kerja sehari-hari. Studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan keuangan, dokumen SPJ, arsip penggajian, serta regulasi internal yang relevan guna memperkuat validitas data.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan tabel tematik untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antarvariabel. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus melalui proses refleksi dan verifikasi terhadap temuan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, sebagaimana disarankan oleh Creswell dan Poth (2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan utama guna memastikan akurasi interpretasi data. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

Melalui penerapan desain kualitatif studi kasus, teknik pengumpulan data yang beragam, serta analisis data yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji dalam konteks keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Nabire.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan SIPD, penyusunan SPJ, dan penginputan gaji di Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja
1	Kepala Dinas	1	S2	>15 Tahun
2	Sekretaris	1	S2	>10 Tahun
3	Pejabat Pengelola Keuangan	2	S1	8–12 Tahun
4	Operator SIPD	2	D3/S1	5–8 Tahun
5	Bendahara	1	S1	>10 Tahun
6	Staf Administrasi	3	SMA/S1	3–7 Tahun
	Total	**10**		

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Berdasarkan **Tabel 4**, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma dan sarjana serta pengalaman kerja yang relatif memadai. Namun, tidak semua responden memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang teknologi informasi atau akuntansi pemerintahan, yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan sistem administrasi keuangan.

Ringkasan Hasil Wawancara

Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji, dilakukan wawancara mendalam terhadap seluruh responden. Ringkasan hasil wawancara disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Wawancara Informan

No	Informan	Fokus Wawancara	Temuan Utama
1	Kepala Dinas	Kebijakan dan pengawasan	Pengawasan belum optimal karena keterbatasan SDM
2	Sekretaris	Koordinasi internal	Koordinasi masih bergantung pada individu tertentu
3	PPK	Pengelolaan SIPD	Kesulitan teknis dalam penginputan data
4	Operator SIPD	Operasional sistem	Minim pelatihan resmi
5	Bendahara	Penyusunan SPJ	Sering terjadi revisi dokumen
6	Staf Administrasi	Penggajian	Kesalahan data masih terjadi
7	Staf Administrasi	Beban kerja	Beban kerja tinggi dan tidak seimbang
8	Operator SIPD	Integrasi sistem	Sistem belum sepenuhnya terintegrasi
9	PPK	Pelaporan keuangan	Keterlambatan laporan
10	Sekretaris	Evaluasi kinerja	Evaluasi belum terstruktur

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengungkapkan adanya keterbatasan kompetensi teknis, beban kerja yang tinggi, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi sebagai faktor penghambat utama pengelolaan administrasi keuangan.

Hasil Analisis Tematik

Data hasil wawancara dan observasi dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul. Proses analisis menghasilkan beberapa tema utama sebagaimana disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Hasil Analisis Tematik Penelitian

No	Tema Utama	Subtema	Indikator	Makna Tematik
1	Keterbatasan SDM	Kompetensi rendah	Minim pelatihan	Kapasitas teknis belum memadai
2	Ketimpangan Beban Kerja	Ketergantungan individu	Multi-tugas	Risiko overload kerja
3	Kelemahan Sistem	Integrasi rendah	Gangguan teknis	Efektivitas sistem terbatas
4	Lemahnya Supervisi	Monitoring minim	Evaluasi informal	Kontrol internal lemah
5	Adaptasi Teknologi	Resistensi perubahan	Kurang motivasi	Transformasi belum optimal

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji bersumber dari keterbatasan SDM, distribusi kerja yang tidak proporsional, serta lemahnya sistem pengawasan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji di Dinas Sosial Kabupaten Nabire belum berjalan secara optimal. Keterbatasan kompetensi teknis dan minimnya pelatihan formal menyebabkan pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem secara efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Septiani dan Isnawaty (2024) serta Febriana (2025) yang menegaskan bahwa kapasitas SDM merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan.

Distribusi beban kerja yang tidak merata juga menjadi permasalahan signifikan. Ketergantungan pada beberapa pegawai tertentu menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi. Kondisi ini memperkuat temuan Aditiya dan Kusuma (2024) yang menyatakan bahwa ketimpangan beban kerja berdampak negatif terhadap kinerja pelayanan publik.

Dari aspek sistem, penelitian ini menemukan bahwa integrasi SIPD dengan sistem pendukung lainnya masih terbatas. Gangguan teknis dan keterbatasan akses sistem menyebabkan keterlambatan pelaporan dan revisi dokumen SPJ. Hal ini menunjukkan bahwa aspek

teknologi belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mergel et al. (2019) mengenai pentingnya kesiapan infrastruktur dalam transformasi digital sektor publik.

Selain itu, lemahnya supervisi dan evaluasi internal memperparah permasalahan yang ada. Monitoring yang belum terstruktur menyebabkan kesalahan yang sama terus berulang tanpa perbaikan sistematis. Temuan ini sejalan dengan Diamond (2020) yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks penginputan gaji, penelitian ini menemukan bahwa kesalahan data dan keterlambatan administrasi masih sering terjadi akibat kurangnya validasi dan keterbatasan operator. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepuasan dan motivasi pegawai, sebagaimana dijelaskan oleh Kim dan Perry (2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertama, kinerja pengelolaan SIPD, SPJ, dan penginputan gaji belum optimal akibat keterbatasan SDM, ketimpangan beban kerja, dan kelemahan sistem. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia terbukti berdampak langsung terhadap efektivitas administrasi keuangan melalui rendahnya akurasi data dan keterlambatan pelaporan. Ketiga, kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya pelatihan, lemahnya supervisi, serta integrasi sistem yang belum memadai. Keempat, upaya perbaikan yang telah dilakukan masih bersifat parsial dan belum terprogram secara berkelanjutan. Kelima, strategi peningkatan kinerja perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, penataan struktur kerja, peningkatan kualitas sistem informasi, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan tata kelola keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas manajemen organisasi. Integrasi antara teknologi, kompetensi, dan kepemimpinan menjadi kunci utama dalam mewujudkan administrasi keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan penginputan gaji di Dinas Sosial Kabupaten Nabire belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengelolaan administrasi keuangan. Minimnya pelatihan formal, ketimpangan distribusi beban kerja, serta ketergantungan pada beberapa pegawai tertentu menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan dan meningkatnya potensi kesalahan administrasi.

Selain faktor SDM, keterbatasan integrasi sistem informasi dan lemahnya mekanisme supervisi internal turut memperburuk kualitas pengelolaan SIPD, SPJ, dan sistem penggajian. Gangguan teknis, rendahnya validasi data, serta evaluasi yang belum terstruktur menghambat upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan organisasi dan manajerial.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberadaan sistem informasi berbasis teknologi tidak secara otomatis menjamin peningkatan kinerja administrasi keuangan. Keberhasilan implementasi sistem sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan kepemimpinan, serta efektivitas tata kelola internal. Dengan demikian, peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek teknologi, manusia, dan manajemen organisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut.

Pertama, Dinas Sosial Kabupaten Nabire perlu menyusun program pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis SIPD, penyusunan SPJ, dan sistem penggajian yang terstruktur dan terprogram. Pelatihan tidak hanya bersifat insidental, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi pegawai.

Kedua, diperlukan penataan ulang distribusi tugas dan beban kerja agar lebih proporsional sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing pegawai. Rotasi tugas

dan sistem pendampingan (*mentoring*) juga dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada individu tertentu serta meningkatkan transfer pengetahuan internal.

Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan integrasi sistem informasi agar mendukung kelancaran operasional SIPD, SPJ, dan penggajian. Penyediaan dukungan teknis, pemeliharaan sistem secara berkala, serta peningkatan akses jaringan menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas sistem.

Keempat, penguatan mekanisme supervisi dan evaluasi internal perlu dilakukan melalui pembentukan sistem monitoring yang terstruktur dan berbasis indikator kinerja. Evaluasi berkala terhadap pengelolaan administrasi keuangan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pencegahan kesalahan yang berulang.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif pengaruh kompetensi SDM, kualitas sistem, dan kepemimpinan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perluasan lokasi penelitian ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda juga penting untuk meningkatkan generalisasi temuan.

Melalui implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan SIPD, SPJ, dan sistem penggajian di Dinas Sosial Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, R., & Kusuma, H. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan. *Jurnal Administrasi Publik, 15*(2), 145–158. https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.4567

Agolla, J. E., Lill, J. B. V., & Tshikila, J. M. (2021). Digital transformation in public sector: The role of leadership and human capital. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review, 9*(1), 1–11. https://doi.org/10.4102/apsdpr.v9i1.508

Barney, J. B. (2018). Resource-based theory: Creating and sustaining competitive advantage. Oxford University Press.

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Diamond, J. (2020). *Public financial management: A practitioner's guide*. International Monetary Fund.

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2021). Digital-era governance: IT corporations, the state, and e-government. *Oxford University Press*.

Dunlop, C. A., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2020). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 30*(1), 1–18. https://doi.org/10.1093/jopart/muz032

Febriana, D. (2025). Pengaruh penerapan SIPD terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 7*(1), 25–38. https://doi.org/10.31227/jasp.v7i1.1023

Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing, 72*(12), 2954–2965. https://doi.org/10.1111/jan.13031

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kemendagri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019). *Sistem manajemen kinerja ASN*. KemenPANRB.

Kim, S., & Perry, J. L. (2020). The impact of public service motivation on public employee performance. *Public Administration Review, 80*(5), 743–755. https://doi.org/10.1111/puar.13176

Kholifah, N. (2023). Evaluasi implementasi sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas SPJ. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, 11*(2), 112–125. https://doi.org/10.21070/jap.v11i2.876

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019).

Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Niven, P. R. (2021). *Balanced scorecard: Step-by-step for government and nonprofit agencies* (3rd ed.). Wiley.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance. *Journal of Management, 35*(3), 718–804. https://doi.org/10.1177/0149206308330560

Rizka, A. (2025). Analisis sistem akuntansi kas dan pertanggungjawaban keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik, 9*(1), 40–54. https://doi.org/10.32528/jkp.v9i1.2211

Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 86–92. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862

Septiani, R., & Isnawaty, D. (2024). Efektivitas penerapan SIPD dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14*(3), 201–215. https://doi.org/10.24258/jian.v14i3.3567

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2019). *Performance management in the public sector* (2nd ed.). Routledge.

Vandenabeele, W., Ritz, A., & Neumann, O. (2018). Public service motivation: State of the art and conceptual cleanup. *Academy of Management Perspectives, 32*(4), 347–362. https://doi.org/10.5465/amp.2017.0002

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.